



Jurnal Teknik PWK Volume 2 Nomor 3 2013

Online : <http://ejournal-sl.undip.ac.id/index.php/pwk>

KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT DI JAWA TENGAH

Oleh:

Imam Wahyudi¹ dan Asnawi Manaf²

¹Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

²Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

email : imam.whyd26@gmail.com

Abstrak

Keberadaan kawasan kumuh sebagai bentuk kemiskinan dalam dimensi keruangan sudah menjadi permasalahan utama kawasan-kawasan perkotaan di Indonesia. Luas kawasan kumuh perkotaan di Indonesia sudah mencapai angka 57.800 Hektar di tahun 2009 dengan penambahan kantong-kantong permukiman kumuh mencapai 1,37% pertahunnya (BPS, 2011). Banyak pihak mulai menyadari bahwa penyelesaian permasalahan kawasan kekumuhan tidak bisa diselesaikan oleh Pemerintah Daerah saja atau masyarakat saja namun perlu adanya kerjasama dari keduanya. Kegiatan penataan lingkungan berbasis masyarakat lahir sebagai salah satu intervensi yang berupaya membangun kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat sebagai bentuk kerjasama dalam menata lingkungan tempat tinggal yang kumuh. Penelitian ini mencoba menangkap sejauh mana kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat terimplementasi di kegiatan tersebut. Kajian ini menjadi perlu dilakukan untuk menggambarkan mengenai keefektifan pelaksanaan kegiatan dalam mengatasi kawasan kumuh dan pembelajaran yang bisa diambil dari kegiatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus di dua lokasi penataan di Jawa Tengah. Dari hasil analisis tergambar bahwa kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dapat dilihat pada tahap perencanaan partisipatif, dialog komunikasi yang dilakukan, tinjauan perencanaan dan kebijakan di skala kota, dan kegiatan channeling pada tahap pembangunan. Dalam pelaksanaannya keberpihakan Pemerintah Daerah menjadi kunci sukses dari kegiatan penataan lingkungan berbasis masyarakat ini. Dari hasil temuan lapangan dapat disimpulkan bahwa intervensi kegiatan telah mampu menata lingkungan permukiman yang kumuh menjadi lingkungan yang tertata dan juga merubah perilaku masyarakat untuk hidup bersih. Intervensi kegiatan penataan ini dapat terbentuk didasari oleh adanya kemitraan yang terjalin antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

Kata Kunci : Kawasan Kumuh, Kemitraan, Pemerintah Daerah, Masyarakat

Abstract

The existence of slums as the spatial dimension of poverty began to be the main problems of urban areas in Indonesia. In 2009, urban slums in Indonesia has reached 57,800 hectares and the increase of slum pockets until 1.37% per year. People realize the problem of slums cannot be resolved by the local government or community individually but it need a partnership between them. Community Based Neighborhood Development activity was established as a form of intervention that built a partnership of that actors in managing the slums. This study tried to capture the extent of partnership between the local government and the community that implemented in Community Based Neighborhood Development activity. This study should be conducted to illustrate how far the effectiveness of that activity and what lesson learned can be concluded if implemented properly by local government and community. To achieve the goals, this research used qualitative methods especially case study in two locations in Central Java that implemented Community Based Neighborhood Development activity. The results illustrate that partnership between local government and community occurs at critical stages of this activity such as participatory planning, communication dialogues, review of planning and policy in urban scale, and channeling in the implementation phase of construction. To conclude, by partnership between local government and community, this activity has been able to organize the slums into attractive area and gradually changes the local community into healthy live behaviors.

Keywords: Slum, Partnership, Local Government, Community

PENDAHULUAN

Kemiskinan dalam aspek keruangan akan terus berkaitan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal masyarakat miskin yang umumnya hidup di kawasan kumuh dengan kondisi prasarana tidak memadai dan kualitas lingkungan yang tidak bersih. Umumnya lingkungan tempat tinggal masyarakat miskin mengalami kondisi akan kurangnya pemenuhan infrastruktur serta jaminan akan tempat tinggal mereka khususnya Kemiskinan di kawasan perkotaan menjadi isu penting yang menjadi pusat perhatian saat ini dimana akan berkaitan dengan pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan yang tidak diimbangi yang tinggal pada kawasan perkotaan. dengan ketersediaan lahan yang memadai. Data statistik menunjukkan bahwa luas kawasan kumuh perkotaan di Indonesia sudah mencapai angka 57.800 Hektar di tahun 2009 dengan penambahan kantong-kantong permukiman kumuh mencapai 1,37% pertahunnya (BPS, 2011). Masyarakat miskin yang tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk tinggal di lingkungan yang layak pada akhirnya akan tetap tinggal di lingkungan permukiman kumuh sebagai cerminan kantong-kantong utama kemiskinan.

Isu penting yang mulai muncul saat ini bahwa untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan terkait penanganan kawasan kumuh tidak lagi bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah saja atau masyarakat saja karena adanya keterbatasan yang dimiliki dari masing-masing pihak. keterbatasan dari yang ada tentunya akan lebih terminimalisir apabila masyarakat dan Pemerintah Daerah ini saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Dari kondisi ini mulai disadari akan perlunya adanya kerjasama antara kedua pihak tersebut.

Salah satu intervensi yang di keluarkan Pemerintah Pusat terkait penanggulangan kemiskinan khususnya penanganan kawasan kumuh adalah kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (masyarakat). Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi menjadi

konteks utama dalam program ini sehingga memunculkan usaha masyarakat untuk memperbaiki lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Masyarakat menentukan kawasan permukiman dalam lingkup kelurahan yang menjadi kantong-kantong kemiskinan dimana nantinya akan menjadi kawasan prioritas yang dituangkan dalam dokumen rencana bersama. Selain adanya peran dari masyarakat, kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas ini juga mengarahkan adanya keterlibatan dari Pemerintah Daerah. Masyarakat dan Pemerintah Daerah diarahkan untuk bermitra menyusun arahan pembangunan bersama dan berupaya mengimplementasikannya.

Sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan penataan ini kini menjadi pertanyaan mendasar mengenai keberlanjutan pelaksanaannya. Ketidakefektifan pemanfaatan dana BLM (Bantuan Langsung Mandiri) sebagai dana stimulan pembangunan yang diturunkan oleh Pemerintah Pusat di beberapa kota/kabupaten menjadi bukti nyata bahwa tidak semua lokasi menjalankan kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas ini dengan baik. Ketidakmampuan masyarakat menjalankan tahapan yang ada tentunya bisa menjadi salah satu dasar tidak berjalannya kegiatan ini. Namun demikian dibalik ketidakmampuan masyarakat juga terdapat peran Pemerintah Daerah di dalamnya yang seharusnya membantu masyarakat dalam menjalankan tahapan perencanaan hingga pembangunan. Lepasnya peran Pemerintah Daerah juga bisa menjadi salah satu penyebab utama tidak berjalannya pelaksanaan kegiatan. Nyatanya, saat implementasi di lapangan peran Pemerintah Daerah dalam kegiatan ini tergantung dari inisiatif, keaktifan, dan keseriusan Pemerintah Daerah dimasing-masing wilayah dalam menanggulangi kemiskinan yang ada.

Kelurahan Podosugih Kota Pekalongan dan Kelurahan Kebondalem Kabupaten Kendal ditetapkan sebagai lokasi-lokasi sukses dalam menjalankan Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas oleh Satker

PBL Provinsi Jawa Tengah. Kesuksesan ini terlihat dari terimplementasinya rencana pembangunan yang disusun oleh masyarakat dimana hasil pembangunan saat ini bisa dimanfaatkan masyarakat. Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam dua lokasi ini juga dinyatakan cukup besar. Oleh sebab itu dua lokasi ini terpilih menjadi studi kasus bagaimana kegiatan penataan ini dijalankan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah setempat.

Penelitian ini mencoba menangkap sejauh mana kemitraan Pemerintah Daerah dengan masyarakat terimplementasi di Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas sebagai salah satu upaya penataan kawasan kumuh berbasis masyarakat yang mengarah terhadap penganggulangan kemiskinan. Kajian ini menjadi perlu dilakukan untuk menggambarkan mengenai sejauh mana keefektifan kegiatan dalam mengatasi kawasan kumuh apabila dilaksanakan dengan baik dari masing-masing pihak yang terlibat didalamnya. Dari dasar tersebut maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah "Bagaimana kemitraan Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam menjalankan program Penataan Lingkungan Masyarakat Berbasis Komunitas?". Kemitraan yang digambarkan pada penelitian ini lebih ditunjukkan kepada kegiatan-kegiatan nyata yang bersifat pragmatis yang benar-benar mencerminkan kebersamaan dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Kemitraan

Kemitraan dikaitkan secara erat dengan makna kebersamaan. Carson dan Carwell (2009:7) mengartikan kemitraan ini sebagai sebuah komitmen diantara mitra yang bergabung dengan persamaan hak dan kewajiban dalam berpartisipasi serta kebersamaan dalam menanggung keuntungan maupun kerugian yang dihasilkan. Gagasan lain tentang kemitraan diungkapkan oleh Greer (2001, dalam Powell dan Dowling, 2006:307) dimana ia berpendapat bahwa

kemitraan sebagai bentuk sinergi antara dua atau lebih organisasi dimana akan mencapai hasil yang lebih apabila bertindak bersama dibandingkan secara terpisah. Konsep lain tentang kemitraan dijabarkan oleh Tunnard, Ryan, dan Morrison (1991 dan 1996, dalam Morrison, 1996:136) bahwa kemitraan bukan tentang persamaan kekuatan, melainkan tentang komunikasi dan berbagi informasi serta bagaimana bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Dari kajian berbagai pengertian tentang kemitraan tersebut maka disimpulkan bahwa kemitraan merupakan sebuah bentuk sinergi kerjasama antar dua atau lebih individu/organisasi yang terbangun akibat adanya komitmen dan komunikasi untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan.

Unsur-Unsur Kemitraan

Mohr dan Spekman (1994:137) menyimpulkan dari berbagai tinjauan literatur yang ada bahwa atribut kemitraan yang penting selalu berfokus kepada komitmen, koordinasi, saling ketergantungan, dan kepercayaan.

- Komitmen, merupakan kesediaan mitra untuk mengerahkan usaha atas nama hubungan (Portner, 1974 dalam Mohr dan Spekman, 1994:137). Ini menunjukkan sebuah orientasi masa depan dimana setiap mitra berusaha untuk membangun hubungan yang bisa mengatasi permasalahan yang tidak terduga. Komitmen yang tinggi ditunjukkan bilamana kedua belah pihak dapat mencapai tujuan individu bersama tanpa memperlihatkan perilaku untuk mencari keuntungan (Cummings, 1984 dalam Mohr dan Spekman, 1994:138)
- Koordinasi, Narus dan Anderson (1987, dalam Mohr dan Spekman, 1994:138) menjelaskan bahwa kemitraan yang berhasil ditandai dengan tindakan – tindakan yang terkoordinasi dan diarahkan pada tujuan bersama yang konsisten.
- Saling ketergantungan, terbentuknya sebuah kemitraan didasari oleh saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Kedua belah pihak mengakui bahwa keuntungan dari saling ketergantungan

memberikan manfaat lebih besar dari baik daripada dilakukan sendiri.

- Kepercayaan, Zand (1972, dalam Mohr dan Spekman, 1994:138) berpendapat bahwa kurangnya kepercayaan akan merusak untuk bertukar informasi, kelancaran hubungan timbal balik, dan akan mengurangi efektivitas pemecahan masalah bersama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus. Metode pengambilan sampling adalah metode *non probability sampling* dengan teknik sampling yang digunakan adalah *purposeful sampling*. Di sini terpilih beberapa informan kunci yang mampu memberikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di dua lokasi yaitu Kelurahan Podosugih dan Kelurahan Kebondalem. Beberapa informan kunci tersebut terdiri atas Tim Koordinasi Pelaksana Program (TKPP) dalam hal ini adalah Bappeda dan Dinas PU, serta SKPD yang bermitra langsung dengan masyarakat seperti KLH dan Bappermas. Selain dari pihak Pemerintah Daerah Kota Pekalongan dan Kabupaten Kendal, informan juga terdiri atas fasilitator kelurahan, anggota BKM, dan juga masyarakat relawan.

Wawancara telah dilakukan kepada 15 informan sebagai perwakilan dari berbagai informan utama yang tergambar di atas. Selain wawancara mendalam, dilakukan juga observasi lapangan ke lokasi penataan serta kajian dokumen perencanaan yang disusun oleh masyarakat dan laporan pertanggungjawaban di masing-masing lokasi penelitian. Hasil wawancara kemudian diolah dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman.

HASIL PEMBAHASAN

Permasalahan Lingkungan yang Diangkat

Kelurahan Podosugih Kota Pekalongan

Kelurahan Podosugih merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Pekalongan Barat. Isu kemiskinan dan kekumuhan yang diangkat diprioritaskan di lokasi permukiman

RW 2, 3, dan 7 khususnya sempadan Sungai Asem Binatur. kondisi tepian Sungai Asem Binatur yang tidak terawat sehingga menjadikan kesan kumuh dan bau yang muncul. Selain kondisi sungai yang memprihatinkan, kualitas air sumur di kawasan tepi sungai ini juga berwarna kekuningan dan sedikit berbau. Kondisi permukiman yang ada di kawasan ini cukup padat dengan arah permukiman mengikuti sungai. Selain permasalahan fisik lingkungan yang kumuh, permasalahan perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan keindahan Sungai Asem Binatur ini menjadikan sungai ini sebagai tempat pembuangan sampah. Hal ini yang menjadikan kawasan tepian Sungai Asem Binatur menjadi kawasan prioritas dalam pembangunan melalui kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas ini.

Kelurahan Kebondalem Kab. Kendal

Kelurahan Kebondalem berada di Kecamatan Kota Kendal. Seperti halnya Kelurahan Podosugih, isu kemiskinan terkait kawasan kumuh yang diangkat juga terletak di kawasan sempadan saluran irigasi Kalireyeng. Sempadan saluran irigasi ini juga dimanfaatkan warga sebagai tempat pembuangan sampah. Hal ini memunculkan kumuh dengan tumpukan-tumpukan sampah tersebut. Terkait dengan perilaku masyarakat, masih banyak warga yang belum memiliki WC sehingga memanfaatkan sungai dan lahan kosong sebagai tempat untuk membuang kotoran dari dalam tubuhnya. Hal ini secara langsung mencemari kondisi sungai dan lahan kosong yang ada. Kondisi saluran seperti ini memperparah dari bencana banjir yang sering terjadi akibat luapnya air dari Sungai Blorong dan Sungai Kendal. Dari berbagai permasalahan yang diangkat tersebut menjadikan kawasan irigasi Kalireyeng ini menjadi kawasan prioritas pembangunan.

Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam Kegiatan Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas

Berangkat dari permasalahan yang diangkat oleh masyarakat di Kelurahan

Podosugih dan Kelurahan Kebondalem terkait kawasan kumuh di sempadan sungai/saluran irigasi, terlihat bahwa untuk menata kembali lingkungan tersebut masyarakat membutuhkan sumberdaya-sumberdaya lain untuk membantu baik dalam tahap perencanaan hingga pembangunan. Salah satu pihak yang turut serta membantu dalam kegiatan penataan lingkungan permukiman ini adalah Pemerintah Daerah Kota Pekalongan dan Kabupaten Kendal. Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam kegiatan penataan lingkungan permukiman ini digambarkan dengan adanya peran tim teknis yang terlibat didalamnya. Tim teknis ini terdiri atas SKPD-SKPD yang terlibat dalam kegiatan seperti Bappeda, PU, KLH, Bappermas, dan lainnya.



Sumber: Summary Report Kebondalem, 2011

GAMBAR 1
RAPAT TIM TEKNIS SEBAGAI PERWAKILAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

Dari hasil temuan lapangan, kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan masyarakat di Kelurahan Podosugih dan Kelurahan Kebondalem terbagi menjadi dua kegiatan utama yaitu tahapan implementasi pembangunan sebagai gambaran nyata adanya kemitraan yang telah dilakukan dan tahapan proses perencanaan sebagai hal yang melatarbelakangi terjadinya kemitraan di kegiatan penataan lingkungan permukiman ini. Kedua kegiatan ini tentunya saling terkait sehingga membentuk sebuah gambaran bagaimana kemitraan yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat. Adanya tindakan-tindakan yang dilakukan secara bersama, adanya komunikasi yang terjalin, adanya penyusunan tujuan bersama, serta adanya integrasi rencana

menjadi bentuk-bentuk nyata dari kemitraan yang ada di kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Kelurahan Podosugih dan Kelurahan Kebondalem.

Proses Perencanaan Partisipatif sebagai Tahapan Penyusunan Visi

Proses perencanaan partisipatif merupakan tahapan yang paling mendasari terjadi interaksi antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah. Tahapan ini terdiri atas tiga kegiatan utama yaitu pemetaan swadaya, penjarangan visi bersama, dan penyusunan produk rencana (RPP dan RTBL) yang nyatanya sama-sama dilakukan di Kelurahan Podosugih dan Kelurahan Kebondalem. Poin penting dari proses perencanaan partisipatif ini adalah bagaimana masyarakat dan Pemerintah Daerah mencoba menyusun visi bersama untuk sebagai cita-cita kemajuan kelurahan masing-masing. Dari Kelurahan Podosugih dan Kelurahan Kebondalem memiliki cara yang hampir sama dalam menggali visi yang ada di masyarakat. Ada yang berbentuk rembug warga dan ada juga yang berbentuk kegiatan seperti lomba menggambar anak. Keberadaan, Tim Teknis (perwakilan Pemerintah Daerah), faskel, dan TAPP tidak dapat dipungkiri memiliki peranan penting karena fungsinya membimbing masyarakat yang belum mengetahui bagaimana menjalankan proses perencanaan.

Dialog Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Masyarakat

Komponen utama kemitraan adalah terjalannya komunikasi aktif dan koordinasi antar berbagai *stakeholders* yang terlibat dalam proses perencanaan. Sejalan dengan hal tersebut, maka di dua lokasi kegiatan penataan lingkungan permukiman ini terdapat bentuk-bentuk dialog komunikasi yang sama-sama dilakukan yaitu berupa rembug warga dan lokakarya ditambah Musrenbang yang formal diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Dari hasil wawancara, ketiga jenis dialog komunikasi ini memiliki tujuan dan saat yang berbeda-beda. Rembug warga berkaitan dengan pertemuan yang dilakukan warga

dalam menyusun produk rencana bisa pada kegiatan penyusunan visi, kegiatan pemetaan swadaya, maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang melibatkan banyak lapisan masyarakat didalamnya. Rembug warga ini sering dilakukan *intens* oleh masyarakat di tingkat basis (RT/RW). Lokakarya dilakukan biasanya bertujuan memamerkan hasil kegiatan (pemetaan swadaya dan produk RPP dan RTBL) dan terbuka untuk umum kepada masyarakat luas maupun kepada Pemerintah Daerah agar hasil kegiatan yang telah dilakukan mendapat saran dari berbagai kalangan. Lokakarya ini menjadi bentuk cerminan adanya transparansi dalam pelaksanaan. Untuk Musrenbang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekalongan maupun Kabupaten Kendal saat penjaringan aspirasi masyarakat yang akan dimasukkan ke anggaran APBD.



Sumber: BKM Podosugih, 2011

GAMBAR 2
PROSES DIALOG KOMUNIKASI YANG TERJALIN
ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN
MASYARAKAT

Tinjauan Perencanaan dan Kebijakan Tata Ruang Skala Kota

Tinjauan perencanaan tata ruang skala kota ini merupakan upaya untuk membedah rencana dan kebijakan yang ada di tingkat kota/kabupaten yang berkaitan dengan kawasan prioritas di masing-masing kelurahan. Isu-isu pengembangan dipadukan sebagai upaya untuk mensinergikan rencana yang dibuat oleh masyarakat dengan rencana yang dimiliki Pemerintah Daerah sehingga

arah pengembangan kawasan nantinya akan selaras dengan kebijakan kota/kabupaten.

Desain Kawasan Binatur River Walk (lokasi permasalahan sebagai prioritas pembangunan) telah menyesuaikan ketetapan kota yaitu penggunaan sempadan sungai sebesar 3 meter. Disini sempadan tersebut digunakan untuk akses masuk ke kawasan BRW. Untuk Kelurahan Kebondalem sendiri juga telah menyesuaikan dimana Kalireyeng ditetapkan sebagai RTH oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, dan pemanfaatan saat ini ditujukan untuk RTH aktif yang bisa dimanfaatkan masyarakat Kebondalem.

Makna kemitraan yang tergal dari tinjauan produk rencana ini adalah adanya usaha antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan tindakan kolektif menyatukan berbagai kepentingan yang berbeda yang dituangkan ke dalam produk rencana. Kepentingan masyarakat terakomodir untuk mewujudkan lingkungan yang sesuai impian dalam produk rencana kawasan (RPP dan RTBL), dan kepentingan Pemerintah Daerah sendiri disini menjaga agar yang direncanakan masyarakat sesuai dengan arahan-arahan kota yang telah disusun sebelumnya. Produk RDTR juga tentunya akan menyesuaikan dengan produk RTRW Kabupaten.

Channeling Pemerintah Daerah-Masyarakat dalam Pembangunan

Channeling Pemerintah Daerah dengan masyarakat menjadi salah satu bentuk nyata kemitraan kedua belah pihak dalam tahapan pembangunan. Pada dasarnya pembangunan masih bisa dijalankan dengan memanfaatkan dana BLM sebesar 700 juta Rupiah. Namun demikian dana tersebut tentunya tidak cukup memenuhi semua kebutuhan dana untuk pembangunan. Dari kondisi ini masyarakat didorong untuk berinisiatif mencari sumberdana lainnya seperti berasal dari Pemerintah Daerah.

Pembangunan fisik kawasan Binatur River Walk di Kelurahan Podosugih tidak hanya memanfaatkan dana pembangunan dari BLM yang telah disediakan oleh Pemerintah

Pusat saja, tetapi juga memanfaatkan dana pembangunan yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kota Pekalongan ditambah dengan swadaya yang dilakukan oleh masyarakat Podosugih. Disini dapat tergambar dengan jelas bagaimana bentuk keperdulian Pemerintah Daerah Kota Pekalongan untuk membantu mensukseskan penataan kawasan Sungai Binatur sebagai salah satu kawasan kumuh yang ada di Kota Pekalongan. Dari adanya kegiatan channeling ini maka terkumpul pendanaan berasal dari Pemerintah Daerah Kota Pekalongan sebesar Rp 1.041.000.000.

Kemitraan dalam implementasi rencana penataan juga tidak hanya terjadi di Kelurahan Podosugih, tetapi juga terjadi di Kelurahan Kebondalem. Dalam pembangunan Kawasan Kalireyeng ini, sumber dana pembangunan tidak hanya mengandalkan uang BLM tetapi juga banyak menggunakan dana-dana pembangunan dari sumber lainnya. Hal ini juga menunjukkan adanya komitmen dari Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengimplementasikan rencana pembangunan yang telah disusun bersama. Pendanaan untuk penataan Kawasan Kalireyeng tidak berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal saja, tetapi juga berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat. Total pendanaan yang didapat dari channeling ini adalah sebesar Rp 41.875.150.000 dimana dana tidak hanya untuk penataan Kalireyeng tetapi juga pembangunan rumah susun di dekat Kalireyeng.

Hasil Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam Tahap Perencanaan Hingga Pembangunan Kelurahan Podosugih

Penataan lingkungan sudah dilakukan di kawasan tepian Sungai Binatur dimana masyarakat Podosugih sendiri merubah kawasan kumuh menjadi kawasan yang asri. Kelengkapan prasarana khususnya jalan dan penerangan mulai memadahi dimana dulunya tidak ada akses pada sempadan sungai tersebut kini sudah tersedia akses sehingga keberadaan Sungai Binatur lebih diperhatikan.

Dari adanya penataan lingkungan tepian Sungai Binatur ini secara tidak langsung merubah perilaku masyarakat Podosugih yang dahulunya kurang memiliki sikap hidup bersih dan memperhatikan keberadaan Sungai Binatur. Pembukaan akses di sempadan sungai dan perubahan orientasi rumah-rumah yang dulunya membelakangi kini menghadap sungai secara tidak langsung membuat masyarakat disana memperhatikan keberadaan Sungai Binatur ini. Dahulu masyarakat membuang sampah sembarangan di pinggir sungai atau langsung ke sungai, sekarang mereka malu untuk membuang ke sungai dan mulai memanfaatkan tempat sampah-tempat sampah yang telah disediakan di sana. Keberadaan SLBM juga secara tidak langsung merubah perilaku hidup tidak sehat disana. Masyarakat Podosugih yang tidak memiliki MCK sekarang tidak lagi buang air besar ke sungai tetapi mulai memanfaatkan SLBM ini.

Kelurahan Kebondalem

Seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Podosugih, dampak yang dihasilkan dari adanya kegiatan penataan ini juga dirasakan secara fisik dan perilaku masyarakat Kebondalem. Secara fisik dapat terlihat adanya penataan yang dahulunya kumuh kini mulai menjadi kawasan asri. Peningkatan prasarana pun terjadi seperti jalan sebagai akses di RTH Kalireyeng ini dan juga penambahan lampu-lampu. Peningkatan kualitas lingkungan tentunya dapat dirasakan disini dimana dikembangkan menjadi RTH baru dengan tanaman-tanaman yang menghiasi wajah saluran irigasi Kalireyeng.

Perubahan perilaku masyarakat Kebondalem juga dirasakan dari adanya pembangunan kawasan ini. Kini masyarakat Kebondalem mulai tidak membuang sampah dan BAB di saluran irigasi ini lagi. Hal ini tentunya merupakan dampak positif yang bisa dilihat dari adanya penataan kawasan Kalireyeng ini. Tentunya keberhasilan pembangunan kawasan ini tidak terlepas dari adanya kerjasama yang tercipta antara masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Lesson Learned Yang Bisa Diambil Dari Pelaksanaan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas

Dari pelaksanaan penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas yang dilakukan di Kelurahan Podosugih dan Kelurahan Kebondalem maka dapat disimpulkan *lesson learned* yang dari kedua lokasi ini yaitu:

- Dari adanya kegiatan ini maka tergambar bahwa penataan kawasan kumuh akan lebih efektif dilakukan apabila adanya kerjasama dan usaha bersama antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah. Masyarakat mengetahui betul gambaran kondisi tempat tinggalnya dan Pemerintah Daerah memiliki sumberdaya yang mampu membantu masyarakat. Keterlibatan dan peran aktif dari masing-masing pihak ini menjadikan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan permukiman ini dapat terimplementasi dengan baik hingga tahap pembangunan.
- Keberpihakan Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat menjadi kunci penting pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan permukiman ini sehingga terjalin kemitraan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah. Dari Kelurahan Podosugih dan Kelurahan Kebondalem, keberpihakan Pemerintah Daerah tidak hanya tertuang dalam keikutsertaan tim teknis dalam proses perencanaan tetapi juga dalam pembiayaan pembangunan. Kondisi ini yang bisa dicontoh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya.
- Kepercayaan yang tumbuh antara Pemerintah Daerah dengan BKM menjadi modal bagaimana kegiatan penataan ini dapat berjalan baik di Kelurahan Podosugih dan Kelurahan Kebondalem. Kinerja BKM yang dinilai baik dalam setiap tahapan PNPM-MP menjadi modal kuat tumbuhnya kepercayaan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat. Dari sini tergambar bahwa kepercayaan menjadi modal penting dalam membangun kemitraan dalam menataan lingkungan permukiman.

- Penataan Kawasan Kalireyeng dan Sungai Binatur kini menjadi program pembangunan skala kota. Hal ini ditunjukkan dari keberlanjutan pembangunan yang dipegang oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Untuk penataan tepian Sungai Binatur direncanakan untuk dilanjutkan ke Kelurahan Kelurahan Medono dan Kelurahan Pasirsari yang berbatasan dengan Kelurahan Podosugih. Untuk penataan Kalireyeng dilanjutkan pembangunannya sepanjang 1,3 km menggunakan dana Pemerintah Provinsi. Hal ini menggambarkan bahwa usaha masyarakat untuk menata lingkungan tempat tinggalnya menjadi momentum yang baik dalam menyusun perencanaan efektif yang benar-benar berdasarkan kondisi permasalahan yang ada.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Keberhasilan dan keefektifan pelaksanaan kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Kelurahan Podosugih dan Kelurahan Kebondalem didasari oleh adanya kemitraan yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat yang dijalankan dengan baik dari tahap perencanaan hingga pembangunan. Kemitraan ini tertuang dalam beberapa kegiatan mulai dari perencanaan partisipatif, dialog komunikasi, tinjauan kebijakan skala kota, dan juga *channeling* yang terjalin pada tahap pembangunan. Keberpihakan Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan kegiatan penataan ini menjadi salah satu kunci keberhasilan. Dari adanya kemitraan ini maka intervensi kegiatan Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas ini dapat dicapai dalam menata lingkungan kumuh menjadi lingkungan yang tertata dengan baik dan juga merubah perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

Rekomendasi

Rekomendasi lebih diarahkan kepada keberlanjutan pemanfaatan hasil pembangunan baik di Kelurahan Podosugih dan Kelurahan Kebondalem. Untuk masyarakat setempat dan Pemerintah Daerah perlu adanya peningkatan usaha lebih untuk menciptakan keberlanjutan perawatan pemanfaatan hasil pembangunan khususnya dalam menciptakan kegiatan yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Kelurahan Podosugih dan Kelurahan Kebondalem. Keberlanjutan ini perlu diperhatikan agar kegiatan penataan yang telah dilakukan dapat terjaga dengan baik hasilnya dan dapat secara berkelanjutan dimanfaatkan oleh masyarakat Podosugih dan Kebondalem.

DAFTAR PUSTAKA

- BKM Podosugih. 2009. *Dokumen RPP dan RTBL Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Kelurahan Podosugih*. Badan Keswadayaan Masyarakat Podosugih Kelurahan Podosugih Kota Pekalongan
- _____. 2012. *Laporan Pertanggungjawaban Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Kelurahan Podosugih*. Badan Keswadayaan Masyarakat Podosugih Kelurahan Podosugih Kota Pekalongan
- BKM Sejahtera Mandiri. 2009. *Dokumen Rencana RPP dan RTBL Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Kelurahan Kebondalem*. Badan Keswadayaan Sejahtera Mandiri Kelurahan Kebondalem Kabupaten Kendal
- _____. 2012. *Laporan Pertanggungjawaban Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Kelurahan Kebondalem*. Sekretariat Badan Keswadayaan Sejahtera Mandiri Kelurahan Kebondalem Kabupaten Kendal
- Carson, Alex dan Ros Carwell. 2009. *Effective Practise in Health, Social Care, and Criminal Justice: A Partnership Approach* (Second Edition). London: Bell and Bain Ltd, Glasgow.
- Mohr, Jakki dan Robert Spekman. 1994. Characteristics of Partnership Success: Partnership Attributes, Communication Behavior, and Conflict Resolution Techniques. *Jurnal Strategic Management Journal*, Vol. 15, No. 2 (Feb 1994), Hal. 135-152.
- Morrison, Tony. 1996. "Partnership and Collaboration: Rhetoric and Reality". *Child Abuse and Neglect Journal*. Vol 20 No 2 Hal 127 – 140.
- Powell, Martin dan Bernard Dowling. 2006. "New Labour's Partnership: Comparing Conceptual Model with Existing Forms". *Social Policy & Society* 5:2, Hal 305–314. United Kingdom : Cambridge University Press